

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, serta pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai cita-cita dan tujuan bersama, tetapi juga sebagai nilai dasar yang harus diinternalisasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pemerintahan, pendidikan, sosial, politik, dan kebudayaan. Di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, Pancasila memiliki posisi yang sangat penting sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa agar keberagaman yang ada tidak berubah menjadi sumber perpecahan. Karena itu, penguatan ideologi Pancasila menjadi kebutuhan yang terus-menerus dilakukan oleh negara melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Dalam konteks negara modern, ideologi tidak cukup hanya dipahami sebagai seperangkat konsep normatif, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui kebijakan publik. Pemerintah berkewajiban menjaga agar nilai-nilai dasar negara tetap hidup dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan perilaku masyarakat.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia telah menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945. Namun, di era globalisasi dan disrupsi digital saat ini, ancaman disintegrasi bangsa semakin nyata, seperti radikalisme, hoaks, dan polarisasi sosial yang melemahkan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah pusat

merespons dengan meluncurkan Program Penguatan Ideologi Pancasila (PIPP) melalui Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila republik Indonesia nomor 4 Tahun 2024, yang bertujuan menetapkan pedoman strategis yang terencana, sistematis, dan terpadu untuk penguatan nilai-nilai Pancasila. Secara nasional, pembangunan Indonesia diarahkan untuk memperkuat identitas kebangsaan, menjaga persatuan, dan menciptakan masyarakat yang berdaya dalam bingkai NKRI. Dalam konteks ini, penguatan ideologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan stabilitas sosial-politik dan ketahanan nasional. Pancasila menjadi rujukan dalam menyelesaikan perbedaan pandangan, mengelola keberagaman, dan mendorong kehidupan demokratis yang sehat. Dengan demikian, penguatan ideologi Pancasila bukan sekadar program seremonial, melainkan bagian dari strategi fundamental negara untuk menjaga keberlangsungan bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, polarisasi sosial, serta menurunnya kepedulian terhadap nilai kebangsaan.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila karena pemerintah daerah merupakan ujung tombak pelayanan publik sekaligus pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Di tingkat daerah, tugas menjaga stabilitas sosial, kerukunan, dan persatuan dilaksanakan oleh perangkat daerah tertentu yang memiliki kewenangan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan menjadi lembaga yang sangat relevan untuk dikaji karena memiliki tanggung jawab langsung dalam urusan ideologi, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, organisasi

kemasyarakatan, kewaspadaan nasional, dan penanganan konflik. Dalam dokumen resmi Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan, lembaga ini ditegaskan sebagai badan daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan bidang kesatuan bangsa dan politik pemerintah daerah, dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah. Pada daerah Kabupaten Balangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan menjadi leading sektor dalam implementasi PIPP, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kesbangpol serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

Secara kelembagaan, keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memberi dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan tugas Kesbangpol, termasuk dalam penguatan ideologi Pancasila. Dengan dasar hukum tersebut, pelaksanaan program tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari mandat resmi pemerintah daerah. Kabupaten Balangan sendiri memiliki visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021–2026, yaitu **“Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera”**. Visi ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga pada kualitas kehidupan sosial, budaya, dan pemerintahan. Dalam RPJMD tersebut, salah satu misi yang sangat terkait dengan bidang ideologi dan kebangsaan adalah mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan

kondusif. Misi ini memberikan landasan kuat bahwa penguatan ideologi Pancasila adalah bagian integral dari upaya mewujudkan kondisi daerah yang aman, rukun, dan stabil. Keterkaitan antara visi daerah dan penguatan ideologi Pancasila menjadi semakin jelas apabila dilihat dari tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan. Dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021–2026, badan ini memiliki struktur organisasi yang mencakup Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Adanya bidang khusus yang menangani ideologi dan wawasan kebangsaan menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyadari pentingnya penguatan Pancasila sebagai agenda kelembagaan, bukan sekadar kegiatan insidental. Bahkan dalam uraian tugas bidang tersebut ditegaskan bahwa bidang ideologi dan wawasan kebangsaan menyusun program kerja yang mencakup ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan sejarah kebangsaan. Program penguatan ideologi Pancasila pada Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan juga memiliki posisi strategis dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Renstra Badan Kesbangpol menegaskan bahwa salah satu strategi utama lembaga ini adalah penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan di masyarakat. Strategi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang mencakup kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.

Dengan demikian, program ini bukan hanya slogan kebijakan, melainkan telah menjadi bagian formal dari dokumen perencanaan perangkat daerah yang harus diimplementasikan, dievaluasi, dan dilaporkan. Lebih lanjut, dokumen Renstra juga menunjukkan bahwa program tersebut dijalankan melalui berbagai sub kegiatan seperti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan sejarah kebangsaan. Artinya, implementasi program penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Balangan dirancang secara sistematis dan menysasar aspek pembinaan nilai, koordinasi lintas sektor, serta fasilitasi kegiatan masyarakat. Hal ini penting karena internalisasi ideologi tidak dapat berhasil hanya dengan satu bentuk kegiatan, melainkan memerlukan pendekatan yang berkelanjutan, partisipatif, dan kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat lokal.

Hal ini sejalan dengan amanat konstitusional dan sistem perencanaan pembangunan nasional yang menuntut adanya keterpaduan antara visi negara, visi daerah, serta program perangkat daerah. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021–2026 menegaskan bahwa penyusunan pembangunan daerah harus berpedoman pada sistem perencanaan nasional dan menjadi penjabaran visi, misi, serta program kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan program perangkat daerah. Pada sisi lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan tahun 2024 memperlihatkan bahwa lembaga ini memiliki arah kinerja yang terkait langsung dengan penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan. Dalam

dokumen tersebut, salah satu sasaran strategis badan adalah meningkatnya pemetaan daerah potensi konflik dan meningkatnya wawasan politik masyarakat. Selain itu, dokumen kinerja juga menegaskan adanya perhatian pada isu-isu strategis seperti rendahnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi konflik sosial, rendahnya ketahanan sosial, budaya, dan agama, rendahnya wawasan politik masyarakat, serta belum optimalnya pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan. Isu-isu tersebut menunjukkan bahwa tantangan di lapangan masih cukup besar sehingga implementasi program penguatan ideologi Pancasila harus terus diperkuat.

Dokumen LKIP 2024 juga memperlihatkan bahwa kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan secara umum memperoleh capaian yang sangat baik. Dalam ringkasan kinerja yang tersedia, dua sasaran utama dilaporkan mencapai target 100% dan dinilai dengan predikat “Sangat Memuaskan”. Data tersebut menunjukkan bahwa secara administratif dan perencanaan, pelaksanaan program telah berjalan dengan baik. Namun demikian, capaian administratif belum tentu selalu menggambarkan perubahan perilaku sosial masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, kajian ilmiah diperlukan untuk menelaah apakah implementasi program benar-benar efektif, faktor apa yang mendukung keberhasilan, dan hambatan apa yang masih dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Pentingnya penelitian ini juga didukung oleh kenyataan bahwa penguatan ideologi Pancasila memiliki dimensi sosial yang luas. Dalam masyarakat yang beragam, nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, musyawarah, persatuan, dan keadilan sosial harus terus ditanamkan agar tidak memudar

oleh arus individualisme dan pragmatisme. Penguatan ideologi Pancasila di tingkat daerah dapat menjadi instrumen pencegahan konflik sosial, memperkuat ketahanan komunitas, dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan program ini akan berdampak pada kualitas demokrasi lokal, stabilitas sosial, serta hubungan harmonis antarwarga. Selain itu, implementasi program penguatan ideologi Pancasila juga berkaitan erat dengan upaya pembinaan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan membantu masyarakat memahami bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman yang harus dijaga bersama.

Dalam Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan, fungsi bidang ideologi mencakup fasilitasi dan supervisi ideologi dan wawasan kebangsaan, yang menunjukkan bahwa penguatan Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan pendidikan kebangsaan yang lebih luas. Dengan demikian, program ini memiliki fungsi preventif sekaligus edukatif dalam menjaga kohesi sosial di tengah perubahan masyarakat yang cepat.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan, ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya adalah:

1. Rawannya paparan paham radikalisme terhadap Masyarakat Balangan

Masyarakat rentan terhadap paparan paham radikalisme yang menyusup melalui berbagai saluran, terutama media sosial, sementara pemahaman substantif terhadap nilai-nilai Pancasila masih tergolong rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Balangan tahun 2024 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Balangan

tercatat sebesar 73,83 masuk dalam kategori “tinggi” namun masih di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 75,19 dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 2,69%. Kondisi ini menciptakan kerentanan sosial-ekonomi yang berpotensi menjadi lahan subur bagi berkembangnya paham radikal.

2. Aksesibilitas Masyarakat yang terbatas terhadap informasi

Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi yang valid dan berkualitas memperparah kondisi ini; masyarakat di wilayah pelosok kesulitan memperoleh literasi kebangsaan yang kontekstual sehingga mudah terpapar hoaks dan narasi provokatif yang memecah belah persatuan.

3. Lemahnya Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap wawasan kebangsaan.

Upaya pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam menanggulangi masalah tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang memadai. Tanpa instrumen monev yang kuat, Kesbangpol tidak dapat mengukur secara akurat tingkat pemahaman ideologi masyarakat, mengidentifikasi kelompok yang paling terdampak, maupun mengevaluasi efektivitas program sosialisasi yang telah berjalan. Akibatnya, intervensi yang dilakukan cenderung bersifat seremonial dan

kurang tepat sasaran, sementara potensi konflik horizontal akibat migrasi penduduk dan kesenjangan ekonomi tetap mengintai stabilitas daerah.

Kendati demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan berupaya mengoptimalkan kinerja guna peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila (PIPP) pada Masyarakat Kabupaten Balangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan ideologi Pancasila pada Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan merupakan isu yang penting, aktual, dan strategis untuk diteliti. Secara teoritis, penelitian ini relevan untuk mengembangkan kajian implementasi kebijakan publik, terutama pada sektor ideologi dan ketahanan kebangsaan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan analisis sejauh mana Program Penguatan Ideologi Pancasila di daerah Kabupaten Balangan dengan menarik judul tentang **“IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN”**.

B. Fokus Penelitian

Pada dasarnya penentuan masalah dalam penelitian kualitatif berpusat pada suatu fokus. Masalah merupakan keadaan yang bersumber dari hubungan suatu faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang memungkinkan terjadinya suatu pemersalahan dalam bentuk pertanyaan dan sendirinya memerlukan upaya - upaya untuk mencari suatu jawaban. Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dan penelitian.

Penelitian ini menggunakan Teori David C. Korten (1980): Menurut David C. Korten (dalam Tresiana dan Duadji, 2020) bahwa keberhasilan implementasi mempunyai 3 indikator antara lain: *pertama*, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, *kedua*, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, *ketiga*, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Sehingga fokus penelitian ini berfokus pada:

1. Program (*TheProgram*): Rencana penguatan ideologi Pancasila itu sendiri.
2. Organisasi Pelaksana (*TheOrganization*): Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan.
3. Kelompok Sasaran (*TheBeneficiaries*): Masyarakat Kabupaten Balangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Sejauh mana implementasi program penguatan ideologi Pancasila oleh Kesbangpol Kabupaten Balangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat?
2. Apa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program tersebut, seperti partisipasi masyarakat atau keterbatasan sumber daya?
3. Bagaimana dampak program terhadap penguatan karakter kebangsaan di Kabupaten Balangan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan program, termasuk sosialisasi, pembinaan, dan koordinasi ideologi Pancasila.
- b. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, seperti sumber daya atau partisipasi masyarakat.
- c. Mengukur pencapaian target kinerja dalam mewujudkan harmoni sosial dan karakter bangsa di Kabupaten Balangan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian memperkaya kajian akademis tentang implementasi ideologi Pancasila, dengan fokus pada indikator keberhasilan seperti sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan. Ini melengkapi literatur PPKn dan politik daerah, berguna untuk pengembangan teori evaluasi program Kesbangpol serupa di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Balangan
Memberikan rekomendasi perbaikan program berdasarkan Renstra Kesbangpol 2021-2026, seperti optimalisasi partisipasi masyarakat dan penanganan hambatan sumber daya. Bagi pemerintah daerah Balangan, ini mendukung kebijakan harmoni sosial; bagi masyarakat, meningkatkan pemahaman bela negara sehari-hari.

- 2) Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Memperkaya bahan referensi ilmiah dibidang Ilmu Administrasi Publik khususnya di bidang ilmu sosial masyarakat.

3) Bagi Penulis

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir dalam menganalisa masalah – masalah serta menerapkan teori - teori yang telah didapatkan dibangku kuliah terhadap praktek lapangan.

